

# KEBIJAKAN POLITIK HINDIA BELANDA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA: SEBUAH TINAJAUN HISTORIS

**Latifah Rahmi Hasibuan**

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan  
[latifahrahmi12345@gmail.com](mailto:latifahrahmi12345@gmail.com)

**Zainal Efendi Hasibuan**

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan  
[Zainal80.yes@gmail.com](mailto:Zainal80.yes@gmail.com)

## Article History:

Received: Agustus, 10, 2024  
Accepted: September, 29, 2024  
Published: Oktober, 5, 2024

**Abstract.** *The Dutch Colonial Government introduced several policies aimed at regulating and overseeing Islamic education, significantly influencing its development and dynamics in Indonesia. This study utilizes a historical approach and document analysis to investigate the educational policies enforced by the Dutch colonial government and their impact on Islamic education. The research findings indicate that the government of the Dutch East Indies sought to manage and restrict Islamic education through various regulations and the establishment of educational institutions aligned with colonial interests. Additionally, the research sheds light on the resistance of Muslims to these policies and their endeavors to preserve and advance Islamic education in Indonesia.*

## Keywords:

*Education Politics, Islamic Education, Dutch East Indies, Colonialism, Indonesia*

**Abstrak.** Pemerintah Kolonial Belanda menerapkan sejumlah kebijakan untuk mengontrol dan mengawasi pendidikan Islam, hal ini memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan dan dinamika pendidikan Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis dan analisis dokumen untuk mengkaji kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda dan dampaknya terhadap pendidikan Islam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Hindia Belanda berupaya mengontrol dan membatasi pendidikan Islam melalui berbagai peraturan dan pendirian lembaga pendidikan yang disesuaikan dengan kepentingan kolonial. Lebih lanjut, penelitian ini juga menunjukkan resistensi umat Islam terhadap kebijakan tersebut dan upaya mereka dalam mempertahankan dan mengembangkan pendidikan Islam di Indonesia.

## A. LATAR BELAKANG

Pendidikan Islam di Indonesia mempunyai sejarah yang panjang dan kaya, dimulai jauh sebelum kedatangan penjajah Belanda. Selama

berabad-abad, pendidikan Islam berkembang melalui sistem tradisional seperti pesantren dan madrasah yang menjadi pusat penyebaran ajaran Islam dan pembentukan karakter dan moralitas masyarakat Islam. Namun, dengan datangnya kolonialisme Belanda pada awal abad ke-17, keadaan tersebut mulai berubah. Hal ini menyebabkan perbedaan kebijakan dan kepentingan pendidikan di dalam negeri.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, pendidikan menjadi salah satu alat terpenting pemerintah kolonial untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat pribumi. Pemerintah kolonial Belanda tertarik pada pendidikan, tapi bukan berfungsi sebagai sarana penyebaran pengetahuan tetapi juga sebagai alat politik untuk mempertahankan kekuasaan. Hal ini terutama terlihat dalam kebijakan pendidikan Islam yang bertujuan untuk membatasi dan mengendalikan pengaruh Islam terhadap masyarakat pribumi.

Pemerintah kolonial Belanda mulai menunjukkan minat terhadap pendidikan pribumi pada pertengahan abad ke-19. Namun, kepentingan tersebut bukan didasarkan pada keinginan untuk memajukan pendidikan Islam, melainkan pada pelonggaran kendalinya terhadap masyarakat. Salah satu strateginya adalah mendirikan sekolah sekuler yang dikelola oleh pemerintah kolonial dan misionaris Kristen. Sekolah-sekolah tersebut bertujuan untuk menyebarkan nilai-nilai Barat dan meredam pengaruh ajaran Islam yang dianggap dapat merangsang perlawanan terhadap kekuasaan kolonial.

Salah satu kebijakan yg paling menonjol adalah pembatasan sekolah Islam tradisional. Pemerintah kolonial mengeluarkan berbagai peraturan yang mewajibkan sekolah Islam untuk mendapatkan izin operasional dan memenuhi standar tertentu yang ditetapkan pemerintah. Standar-standar ini sering kali ditujukan untuk mengurangi intensitas pendidikan agama dan memperkenalkan lebih banyak mata pelajaran sekuler. Selain itu, kurikulum sekolah Islam juga dirancang untuk mengurangi fokus pada ajaran-ajaran Islam dan

---

mengantinya dengan konten yang lebih sesuai dengan kepentingan kolonial.

Meski memiliki berbagai keterbatasan, masyarakat Muslim Indonesia menunjukkan berbagai bentuk perlawanan dan adaptasi terhadap kebijakan pendidikan kolonial. Beberapa kelompok masyarakat Muslim mendirikan sekolah Islam independen yang beroperasi di luar pengawasan pemerintah kolonial. Sekolah-sekolah ini berupaya melindungi identitas dan ajaran Islam sekaligus memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat. Selain itu, muncul organisasi-organisasi Islam yang memperjuangkan hak atas pendidikan yang lebih adil dan bebas dari campur tangan kolonial.

Perkembangan pendidikan Islam pada masa Hindia Belanda juga ditandai dengan munculnya para intelektual Islam yang berperan penting dalam perjuangan pendidikan Islam. Tokoh seperti Haji Agus Salim dan Ahmad Dahlan, mereka memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan model pendidikan yang memadukan ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan modern. Mereka mendirikan lembaga pendidikan dengan tujuan menghasilkan generasi umat Islam yang terpelajar dan mampu bertahan di dunia modern tanpa kehilangan jati diri keislamannya.

Secara keseluruhan, politik pendidikan Islam pada masa Hindia Belanda mencerminkan hubungan yang kompleks antara upaya pemerintah kolonial dalam menguasai pendidikan dengan perlawanan masyarakat Islam dalam mempertahankan identitas dan ajaran Islam. Langkah-langkah yang diterapkan oleh pemerintah kolonial tidak hanya berdampak pada struktur dan kurikulum pendidikan Islam, tetapi juga kesadaran dan perjuangan masyarakat Muslim untuk mendapatkan hak atas pendidikan.

Melalui analisis yang mendalam, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai dinamika tersebut dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai politik pendidikan Islam

pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Dengan demikian, penulis mengharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga tentang sejarah pendidikan Islam di Indonesia dan relevansinya dengan konteks sosial, politik, dan budaya saat ini.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri dan menganalisis kebijakan pendidikan Islam pada masa pemerintahan Hindia Belanda serta dampaknya terhadap masyarakat Muslim Indonesia. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat mengungkap kronologi peristiwa dan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial serta bagaimana masyarakat meresponsnya.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan analisis dokumen-dokumen sejarah yang relevan. Sumber-sumber yang digunakan meliputi arsip kolonial, karya ilmiah, dan buku-buku sejarah yang membahas pendidikan Islam pada masa kolonial. Selain itu, literatur sekunder yang berhubungan dengan topik juga digunakan untuk memperkuat analisis. Data-data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif analitis untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang kebijakan pendidikan Islam pada masa Hindia Belanda.

Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama dalam kebijakan pendidikan Islam dan respon masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Proses ini melibatkan pengkodean data untuk mengelompokkan informasi yang serupa, kemudian menginterpretasikan hasil temuan dalam konteks sejarah dan politik pada masa itu. Dengan demikian, penelitian ini dapat mengungkap dinamika dan kompleksitas politik pendidikan Islam pada masa pemerintahan Hindia Belanda serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruhnya terhadap perkembangan pendidikan Islam di Indonesia.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pendidikan Islam Pra dan Pasca Pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia

Pendidikan Islam telah ada di Indonesia sejak zaman dahulu. Dalam definisi yang agak longgar, pendidikan Islam telah dipraktekkan sejak masuknya Islam di wilayah Indonesia. Hanya saja pada masa kejayaan kerajaan-kerajaan Islam nusantara, kegiatan pendidikan Islam baru dianggap luar biasa dan mendapat perhatian serius dari para sejarawan. Pada masa kerajaan Islam, keberadaan dan maju mundurnya aktivitas pendidikan Islam hanya bergantung pada struktur kerajaan dan pertimbangannya terhadap pendidikan Islam. Namun pada kenyataannya, jelas bahwa pendidikan Islam mendapat dukungan yang relatif baik dari raja dan sultan Muslim. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ilmuwan Islam dan literatur yang mereka tinggalkan sebagai khazanah klasik Islam Nusantara.

Karakter pendidikan Islam di Indonesia mengalami perubahan besar setelah melalui proses panjang. Kemunduran sistem kerajaan Islam Nusantara dan kemunduran wilayah di bawah kolonialisme bangsa Barat secara langsung berkontribusi pada hancurnya sistem pendidikan tradisional. Setelah Belanda mempelajari Indonesia sekitar tahun 1595 M dan kemudian berhasil mengusir Portugis dari tanah Maluku, Belanda dengan VOC menjalankan pendidikan yang sama seperti Portugis. Hanyasaja disaat Portugis menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan menyebarkan agama Kristen Katolik, disisi lain tujuan Belanda adalah menghilangkan agama Katolik dan menggantinya dengan Kristen Protestan (Steenbrink 1995).

Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan Islam disebut juga pendidikan Bumiputera karena semua yang mengikuti pendidikan Islam adalah orang Indonesia (Azmi, Rama, and Razak 2023). Pada dasarnya kolonialis tidak mensyaratkan pemajuan pendidikan Islam.

Pada masa pemerintahan Belanda, lembaga pendidikan Islam kurang mendapat perhatian serius dibandingkan sekolah lain dalam upaya peningkatan mutu Pendidikan (Harun 2023). Penyebabnya sangat kompleks, diantaranya pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam saat itu mempengaruhi aktivitas perlawanan rakyat ketika pemerintah kolonial Belanda memberlakukan kebijakan non-populis dalam perspektif masyarakat Nusantara (Syarif 2019).

Hancurnya sistem politik dan melemahnya institusi sosial Islam memaksa umat Islam untuk menyelenggarakan pendidikannya di unit-unit masyarakat Islam yang lebih kecil (Rohani 2022). Pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda dapat dibedakan menjadi dua masa, yaitu masa VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) dan masa Hindia Belanda (NederlandsIndie). Pada masa VOC, pendidikan Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip bisnis, khususnya untung rugi dalam hukum ekonomi. VOC tidak segan-segan melancarkan perang jika ada yang mengganggu tujuan mereka. Hal ini terlihat jelas dari hak aktroinya yang tersebut dalam pasal yang menetapkan bahwa “Lembaga ini harus berdagang di Indonesia, dan bila perlu boleh berperang. Dan agama Kristen harus kita urus dengan mendirikan sekolah” (Subhan 2012). Hal ini menyebabkan terjadinya perpecahan pendidikan di Indonesia.

Terbaginya sistem pendidikan Indonesia tentu tidak membantu perkembangan masyarakat Indonesia. Di satu sisi pemahaman diperlukan untuk mewaspadaikan perkembangan dunia luar dengan menggunakan metode dan teknik yang dikembangkan oleh Barat. Di sisi lain, diperlukan juga pemahaman keagamaan terhadap yang sudah ditanamkan sebelum VOC tiba di Indonesia. Untuk menggabungkan kedua sistem ini, muncullah madrasah yang

berkelas dengan bangku dan meja yang dikembangkan oleh para reformis Indonesia (Amin 2019).

## 2. Eksistensi dan Politik Pendidikan Islam pada Masa Kolonial Belanda

Eksistensi dan politik pendidikan Islam pada masa kolonial Belanda di Indonesia antara lain: (Wahid 2022)

### a. Dikotomis

Dikotomi pendidikan sangat jelas terlihat pada masa penjajahan Belanda. Dalam kaitan ini, kedua lembaga pendidikan (sekolah dan pesantren) mempunyai filosofi yang berbeda, sehingga membuahkan hasil dengan orientasi yang berbeda pula. Pada satu sisi kelompok adalah kaum bangsawan dan puriyai yang berpendidikan Barat, dan kelompok lainnya adalah kaum berpendidikan pesantren. Perbedaan yang ekstrim antara ilmu agama dan ilmu umum menyebabkan munculnya sistem pendidikan umum dan sistem pendidikan agama pada akhir abad ke-19 dan berlanjut serta menguat pada abad ke-20. Tentu saja hal ini akan semakin meruntuhkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, khususnya Indonesia yang mayoritas beragama Islam, kebijakan ini lebih dikenal dengan istilah *divide et Impera* (Nasrowi 2023).

Dampak kebijakan politik etis dapat dievaluasi secara singkat berdasarkan fakta bahwa Belanda telah menerapkan reformasi di beberapa bidang, termasuk pendidikan. Namun yang mereka sebut reformasi pendidikan adalah Westernisasi dan Kristenisasi, yaitu untuk kepentingan Barat dan Kristen. Kedua tema inilah yang mewarnai kearifan penjajah Barat di Indonesia.

### b. Diskriminatif

Pendidikan di Hindia Belanda bermula dari kritik dari beberapa individu dan kelompok terhadap penerapan tanam paksa dan kebijakan liberal yang menimbulkan penderitaan dan kemiskinan yang besar pada masyarakat. Kritik ini akhirnya

diakui oleh Ratu Belanda, dan pendidikan pun dimulai, namun dilakukan dengan diskriminasi, karena beberapa sekolah memisahkan anak-anak bangsawan elit dan bangsawan pro-Belanda dari anak-anak rakyat jelata. Anak-anak bangsawan dan tokoh pro Belanda kemudian bekerja membantu Belanda, sedangkan anak-anak rakyat jelata hanya menjadi buruh atau rakyat jelata (M. Nur Qomari, Rusli 2023).

Menurut Nasution sebagaimana dikutip dalam jurnal kewarganegaraan karya Abdul Wahid disebutkan beberapa ciri politik dan praktik pendidikan pemerintah kolonial, khususnya Belanda antara lain:

- 1) Diskriminasi yang luar biasa dalam pendidikan anak Indonesia.
- 2) Diskriminasi pendidikan, menyoroti perbedaan besar antara pendidikan Belanda dan pendidikan dalam negeri.
- 3) Kontrol sosial yang kuat
- 4) Terbatasnya tujuan sekolah pribumidan peran sekolah dalam menghasilkan tenaga kerja menjadi faktor penting dalam pengembangan pendidikan.
- 5) Prinsip koordinasi menjadikan sekolah di Indonesia sama dengan sekolah di Belanda.
- 6) Belum adanya perencanaan pendidikan yang sistematis terhadap pendidikan anak pribumi.

### **3. Peran Ulama dan Tokoh-Tokoh Pendidikan Islam pada Politik Pendidikan Islam Masa Pemerintahan Hindia Belanda Di Indonesia**

Kebijakan kolonial Belanda pada dasarnya melakukan diskriminasi terhadap umat Islam Indonesia, dan Belanda menyadari bahwa memberikan pendidikan pada masyarakat kolonial akan menimbulkan gerakan anti kolonial, sehingga mempengaruhi kebijakan pendidikan Islam. Kewaspadaan dan sikap antisispasi Belanda terhadap umat Islam tentu saja dilatarbelakangi oleh



kekhawatiran dan ketakutan yang dihadapi dalam perang melawan kolonialisme, dan perang melawan kolonialisme selalu melibatkan umat Islam, apalagi gerakan ini diusung oleh tokoh-tokoh Islam, orang-orang yang mempunyai pengaruh besar di masyarakat, misalnya Qiyai dan ulama. Karena pendidikan Islam berada di tangan Qiyai dan Ulama, maka kebijakan mereka terhadap Ulama juga akan mempengaruhi pendidikan Islam.

Saat Belanda berkuasa, kebijakan mereka adalah menekan umat Islam, khususnya ulama pesantren. Hal ini dikarenakan faktor-faktor berikut (Harahap 2023):

- a. Kepentingan nasional. Belanda selalu mendapat kendala dari para ulama, khususnya di bidang perdagangan, karena mereka menganggap ulama mempunyai peran ganda dalam masyarakat sebagai pendakwah dan pedagang (Da'i), apalagi setelah Perang Salib, Belanda masih memandang ulama dan umat Islam sebagai ancaman.
- b. Karena ulama dianggap sebagai kelompok intelektual Islam, maka ikatan antara masyarakat dan ulama sangat kuat, dan pengaruhnya akan semakin besar jika berhasil mendirikan pesantren.
- c. Fakta yang tidak terbantahkan, sebagaimana diakui Thomas Stanford Raffles, adalah bahwa ulama selalu tidak berubah dan selalu hadir dalam setiap pemberontakan.

Keadaan pendidikan islam di zaman pemerintah kolonial Belanda di bagi kepada beberapa fase, yaitu (Sumanti 2018):

- a. Fase I (Sebelum Tahun 1900)

Pada fase ini, pemerintah kolonial mengendalikan banyak sistem yang ada di Indonesia, termasuk mengatur pendidikan dan kehidupan beragama berdasarkan prinsip kolonialisme, Westernisasi, dan Kristen yang merupakan bagian dari misi mereka. Ketika Van den Boss menjadi Gubernur Jenderal Jakarta

pada tahun 1831, ditegaskan bahwa sekolah gereja dianggap sebagai sekolah negeri dan dibutuhkan. Departemen Pendidikan dan Agama digabung menjadi satu. Sebuah sekolah agama Kristen didirikan di setiap wilayah pemukiman. Didirikan 33 buah sekolah sejenis. Penerapan sekolah ini sejalan dengan sistem sekolah yang berkembang di dunia Barat pada saat itu, namun dengan penekanan pada muatan pendidikan agama (Kristen) (Yunus, 1992). Keberadaan sekolah ini menjadi pesaing bagi sistem pesantren ataupun masjid (Hanipudin 2019).

Pendidikan agama Islam di pesantren, masjid, mushola dan sebagainya dianggap tidak membantu pemerintah Belanda. Santri di pesantren masih dianggap buta huruf atau berbahasa Latin. Kebijakan pemerintah Belanda terhadap masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam didasarkan pada rasa takut, ajakan agama, dan kolonialisme.

Berbagai peraturan pemerintah Belanda melarang pergerakan bebas pendidikan Islam di Indonesia (Daulay 2007). Pada tahun 1882, pemerintah Belanda mendirikan lembaga khusus yang mengontrol kehidupan gereja dan pendidikan Islam. disebut *Priesterraden*. Dimana orang yang memberi pelajaran harus meminta izin terlebih dahulu. Alasannya, pemerintah Belanda khawatir akan kemungkinan menghidupkan kembali penduduk asli.

Meskipun Belanda mengatur secara ketat sistem pendidikan, namun terlihat bahwa sebelum tahun 1900 pendidikan Islam pada masa itu bersifat individual, diselenggarakan di rumah tangga, surau atau mesjid. Materi yang diajarkan hanya berkisar pada pelajaran praktis yaitu aqidah dan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Dengan kata lain

pembelajaran yang diberikan saat itu belum sistematis, sekolah juga berlangsung di surau yang sudah ada tingkatannya yaitu: pelajaran Al-Quran dan kajian kitab. Setelah siswa selesai mempelajari Al-Qur'an, ia melanjutkan mempelajari kitab Sharaf, Nahu, Tafsir dan ilmu-ilmu lainnya diajarkan dalam kajian ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ajaran Islam pada masa itu belum sistematis, diberikan secara individual dan materinya sangat sedikit, hanya materi keagamaan. Sementara itu, lembaga pendidikan belum berkembang dengan baik.

b. Fase II (Masa Peralihan 1900 – 1909)

Dalam aspek politik etis yang juga disebut politik balas budi yang dalam hal ini bersumber dari gagasan Van Deventer yang ia terbitkan dalam artikel berjudul *een eereschuld* yang berisi “suatu hutang kehormatan”. Beliau menegaskan, Belanda mempunyai kewajiban terhadap rakyat Indonesia dan utang tersebut harus dibayar (Ricklefs 2005). Ratu Wilhelmina pada 17 September 1901 menerima gagasan Van Deventer tersebut dan mengeluarkan kebijakan dalam pidatonya saat pembukaan perlemen Belanda yang berisi bahwa pemerintah Belanda memiliki panggilan moral dan hutang budi (*eerschuld*) kepada bangsa pribumi (S. Nasution 1983). Kebijakan tersebut terangkum kedalam 3 program utama, antara lain (Adi Kurniawan, Anindya Prameswari 2022):

- 1) Irigasi, merupakan program peningkatan pengairan pada lahan pertanian Bumiputera melalui pembangunan bendungan dan saluran irigasi.
- 2) Imigrasi, program asimilasi penduduk dari Pulau Jawa yang padat penduduknya ke daerah yang penduduknya lebih sedikit di luar Pulau Jawa.

- 3) Pendidikan, yaitu program untuk meningkatkan taraf pendidikan masyarakat adat melalui pemerataan kesempatan belajar dan pengembangan sekolah masyarakat.

Kebijakan pertama dan kedua dimanfaatkan oleh pemerintah Belanda dengan memasang irigasi bukan untuk mengairi sawah rakyat, melainkan untuk perkebunan Belanda itu sendiri. Di sisi lain, kebijakan keimigrasian dilakukan dengan memindahkan penduduk ke areal perkebunan di luar pulau Jawa dan menjadikan mereka sebagai pekerja paksa dengan sistem tanam paksa. Hanya program pendidikan yang membawa manfaat besar dalam dunia pendidikan dan intelektual rakyat bumiputra (Syarif 2019).

Sejak tahun 1900, sekolah-sekolah untuk bangsawan dan rakyat jelata telah didirikan hampir merata di seluruh Jawa. Dalam hal ini manfaatnya bagi warga setempat adalah mereka mempunyai kesempatan lebih besar untuk bersekolah (Wasty Soemanto 1983). Banyak berdiri lembaga pendidikan Islam pada masa ini, seperti Surau Parabek di Sumatera dan Pesantren Tebu Ireng di Pulau Jawa.

Perkembangan pendidikan Islam jauh maju karena para tokoh Islam sudah mengetahui ide pembaharuan dari Mesir. Kelas agama Islam juga mulai bervariasi dan mencakup berbagai bidang ilmu Islam, dan buku-buku yang digunakan juga dicetak dan bervariasi. Kemajuan ini luar biasa karena pada masa inilah pemerintah kolonial Belanda sangat mengontrol pendidikan Islam. mereka gencar menggalakkan pendidikan yang mereka selenggarakan, yakni pendidikan antara golongan.

- c. Fase III (setelah tahun 1909)

Isu nasionalisme sedang merebak di kalangan guru-guru Islam. Pada saat itu, kesadaran untuk memperbaiki sistem

pendidikan dan pesantren yang rusak semakin meningkat karena dianggap tidak lagi sejalan dengan iklim pendidikan dan pangsa pasar yang ada. Jadi kelas agama harus diselenggarakan secara rutin di Madrasah atau sekolah. Madrasah Adabiyah (1909) didirikan di Padang, Madrasah Diniyah (1915) di Padang Panjang, disusul madrasah lainnya hampir di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian terjadilah perubahan sistem pendidikan, dari sistem Sorogan menjadi klasik, dari hanya pendidikan agama menjadi pendidikan umum dan keagamaan.

Upaya dan gerakan reformasi pendidikan dimulai pada pertengahan abad ke-20, seperti yang dilakukan oleh pemuda di Minangkabau, Jami'at Khair, Muhammadiyah, al Irsyad, Persyarikatan Ulama, Persis dan lain-lain. Sebagai efek samping dari reformasi tersebut, pendidikan Islam di Indonesia mengalami perubahan dalam berbagai aspek seperti sistem, kelembagaan, administrasi, penyelenggara dan lulusan dari lembaga pendidikan itu sendiri (Hasnida 2017).

Para ulama dan tokoh-tokoh Pendidikan islam dalam pengembangan Pendidikan Islam di masa pemerintahan hindia Belanda di Indonesia bukanlah hal yang mudah, Sulitnya peraturan yang dibuat oleh Belanda bagi para guru yang termasuk ulama dan tokoh pendidikan Islam dihadapi dengan berbagai cara. Mereka mendirikan lembaga pendidikan baik secara perorangan maupun kelompok/organisasi yang dinamakan madrasah atau sekolah.

#### **D. KESIMPULAN**

Politik pendidikan Islam pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia merupakan periode yang penuh dengan tantangan dan dinamika. Ulama dan tokoh-tokoh pendidikan Islam memainkan peran yang sangat penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Melalui pengembangan sistem pendidikan Islam, pengajaran nilai-nilai Islam, pemberdayaan masyarakat, perlawanan terhadap politik kolonial,

inovasi kurikulum, pengembangan metode pembelajaran, advokasi pendidikan inklusif, dan kolaborasi antar lembaga pendidikan, mereka berhasil mempertahankan dan mengembangkan pendidikan Islam.

## REFERENSI

- Adi Kurniawan, Anindya Prameswari, Yustina Sri Ekwandari. 2022. "IRIGASI DAN PENDIDIKAN POLITIK ETIS DI KOTA METRO." *Journal of Social Studies* 6(2):3.
- Amin, Muh. 2019. "PENDIDIKAN ISLAM MASA PENJAJAHAN BELANDA DAN JEPANG." *Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 10(2):2–3.
- Azmi, Muhammad, Bahaking Rama, and Abd. Rahim Razak. 2023. "PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA PADA ZAMAN PENJAJAHAN BELANDA DAN JEPANG." *Jurnal Pendidikan Islam* 3(1):7.
- Daulay, Haidar Putra. 2007. *Sejarah Pertumbuhan Dan Pembaharuan Pendidikan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hanipudin, Sarno. 2019. "Pendidikan Islam Di Indonesia Dari Masa Ke Masa." *Journal Of Islam and Muslim Society* 1(1):5.
- Harahap, Marisa Hannum. 2023. "Analisis Kebijakan Pendidikan Pemerintah Kolonial Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam." *Jurnal Ilmu Pendidikan* 1(4):5–6.
- Harun, Ihsan. 2023. *Ikhtisar Pendidikan Islam (Antologi Tulisan Pendidikan Islam Dari Teori Hingga Sejarah)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hasnida. 2017. "SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA PADA MASA PRA KOLONIALISME DAN MASA KOLONIALISME." *Jurnal Kordinat* 16(2):15.
- M. Nur Qomari, Rusli, Kasuwi Saiban. 2023. "PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA PADA MASA KOLONIAL." *Jurnal Pengembangan Belajar Dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam* 3(2):10.
- Nasrowi, Bagas Mukti. 2023. "Politik Pendidikan Islam : Studi Kebijakan Publik Belanda Pada Masa Penjajahan Di Indonesia." *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 6(2):7.
- Ricklefs, M. C. 2005. *SEJARAH INDONESIA MODERN 1200-2004*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Rohani, dkk. 2022. "PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA PADA MASA KOLONIAL BELANDA ( Kasus Muhammadiyah Dan NU )." *Journal for Southeast Asian Islamic Studies* 18(2):2.
- S. Nasution. 1983. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya.

- Steenbrink, Karel. 1995. *Kawan Dalam Pertikaian: Kaum Kolonial Belanda Dan Islam Di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Subhan, Arif. 2012. *Lembaga Pendidikan Islam Abad Ke-20 "Pergumulan Antara Modernisasi Dan Identitas"*. Jakarta: Kencana.
- Sumanti, Solihah Titin. 2018. "ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM." *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama* 1(1):3-5.
- Syarif, M. 2019. "POLITIK ETIS PEMERINTAH KOLONIAL HINDIA." *Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama & Kebudayaan* 5(1):2.
- Wahid, Abdul. 2022. "Eksistensi Dan Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Kolonial Belanda." *Jurnal Kewarganegaraan* 6(3):6-8.
- Wasty Soemanto, F. X. Soeyatno. 1983. *Landasan Historis Pendidikan Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Yunus, Mahmud. 1992. *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.